



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 18 Desember 2023

Halaman: 8

BERDASARKAN PERISTIWA HADEGING NAGARI NGAYOGYAKARTA HADININGRAT 13 Maret 1755 Sebagai Hari Jadi DIY

YOGYA (KR) - Hari jadi sebuah daerah dapat dipahami sebagai waktu dimulainya eksistensi suatu daerah menjadi tempat awal berwujud dan berkehidupan baik secara ekonomi, sosial, politik maupun kultural dan berkeadilan.

Untuk itu, menurut Sejarawan UGM dan anggota Tim Penyusunan Naskah Akademik Hari Jadi DIY, Baha Uddin MHum, hari jadi daerah merupakan sebuah peristiwa simbolik yang mencerminkan tonggak penting dimulainya sebuah titatan dan peradaban baru pada daerah tersebut, sehingga dapat dipahami jika setiap daerah di Indonesia mempunyai koinan tersendiri dalam menetapkan hari jadinya sesuai dengan aspek historisnya masing-masing.

Hal lain yang perlu dipahami juga adalah bahwa hari jadi ini tidak selalu identik dengan pembentukan sebuah wilayah secara administratif dan yuridis formal, yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang terjadi pasca kemerdekaan Indonesia.

"Faktor historis yang unik pada masing-masing daerah tetaplah menjadi faktor utama dalam menentukan hari jadinya," kata Baha Uddin terkait penetapan hari jadi DIY, 13 Maret 1755 yang telah disepakati Panitia Khusus (Pansus) BA 45 DPRD DIY dan sesuai yang diusulkan Pemda DIY dalam kegiatan *Public Hearing Raperda Hari Jadi DIY* di Ruang Rapur DPRD DIY, Jumat (15/12).

Lebih lanjut dikatakan, keberadaan hari jadi DIY memiliki arti penting bagi masyarakat dan pemda karena berfungsi untuk memantapkan jati diri, landasan gerak langkah masa depan, melingkupi identitas diri wilayah, tonggak dimulainya sebuah pemerintahan, dan sebagai acuan peringatan bersejarah sebagai refleksi terwujudnya idealisme, harapan-harapan, kesuksesan, dan perjuangan tanpa henti untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warganya.

Untuk mendapatkan hari jadi DIY yang sesuai dengan kesejarahannya, lanjut Baha Uddin, maka harus memenuhi beberapa kriteria yaitu dapat dipertanggungjawab-

kan secara historis, mencerminkan citra dan profil kewilayahan, mengandung nilai semangat kebangsaan dan keindonesiaan, serta menimbulkan kebanggaan bagi warganya.

Selain itu, kata Baha Uddin, keberadaan hari jadi DIY ini juga mendesak mengingat kabupaten/kota yang ada di DIY semuanya sudah memiliki hari jadinya, sehingga hari jadi DIY akan melengkapinya.

Dikatakan, faktor penting yang perlu dipahami dalam konteks historis sebuah daerah adalah adanya perubahan dan keberlanjutan (*change and continuity*). Bahwa dalam perkembangan zaman sebuah daerah pada aspek tertentu akan mengalami perubahan karena berbagai faktor, namun demikian juga ada aspek lain yang mencerminkan sebuah keberlanjutan.

Hal ini juga terjadi pada Yogyakarta. Perubahan pada entitas Yogyakarta terjadi pada aspek bentuk administratif pemerintahannya.

"Sejak tanggal 13 Maret 1755, dengan Peristiwa Hadeging Nagari, Yogyakarta dideklarasikan menjadi sebuah Nagari dengan bentuk pemerintahan sebagai Kasultanan (kerajaan) dengan kedudukan sebagai daerah independen," jelas Baha Uddin.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, lanjutnya, wilayah Yogyakarta (Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman) secara administratif pemerintahan berstatus sebagai daerah Vor-

stenlanden, yaitu daerah khusus yang memiliki otonomi karena pemerintahannya diperintah oleh raja, dengan kedudukan sebagai *zelfbestuurende landschappen* (daerah swapraja/daerah otonom/daerah istimewa).

"Sejak saat itu secara administratif pemerintahan kolonial di Yogyakarta menjadi sebuah Karesidenan," katanya.

Menurut Regeering Reglement Tahun 1854, Yogyakarta termasuk daerah yang diperintah dengan *indirect gebied* yaitu daerah yang diperintah secara tidak langsung oleh Gubernur Jenderal. Untuk itu kemudian ditempatkan Residen sebagai representasi pemerintah kolonial di Yogyakarta.

"Pada 1927 status administratif daerah Yogyakarta sebagai karesidenan ditingkatkan menjadi provinsi, sehingga pejabat kolonialnya bukan lagi residen melainkan gubernur," jelasnya.

Pada masa pendudukan Jepang, lanjutnya, tanggal 1 Agustus 1942, bentuk pemerintahan administratif Yogyakarta berubah menjadi Kooi (daerah istimewa) dan Sultan Hamengku Buwono IX diangkat menjadi Koo (kepala daerah istimewa).

Selanjutnya pasca kemerdekaan Republik Indonesia, Sultan Hamengku Buwono IX bersama dengan Paku Alam VIII mengeluarkan Amanat 5 September 1945 yang menyatakan bahwa, daerah Kasultanan dan Pakualaman menjadi bagian dari Republik Indonesia dengan status sebagai daerah



KR-Wawan Irawan
Baha Uddin MHum

Kemudian menurut UU Nomor 3 Tahun 1950, dengan jelas disebutkan bahwa Yogyakarta adalah sebuah daerah istimewa selingkat provinsi yang wilayahnya terdiri dari Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman.

Meskipun bentuk administratif Yogyakarta mengalami perubahan sesuai dengan dinamika dan tuntutan zaman, namun ada aspek yang tidak pernah mengalami perubahan atau mencerminkan adanya keberlanjutan yaitu sifat dan hakikatnya. "Sejak didirikan hingga kini sifat dan hakikat Yogyakarta adalah sebuah kerajaan," kata Baha Uddin.

Perubahan bentuk Yogyakarta ini merupakan strategi dalam mempertahankan diri (*survival spirit*) dan keberlangsungan (*sustainability*) sebagai sebuah entitas agar eksistensinya tetap terjaga.

Menurut Baha Uddin, UU

No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta semestinya dibaca lebih sebagai bentuk penghormatan terhadap ketulusan dan komitmen Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII yang berintegrasi dengan Indonesia, daripada pembentukan daerah dan pemberian keistimewaan oleh pemerintah pusat.

Setelah dilakukan kajian terhadap kesejarahan DIY dari periode awal hingga kini diperoleh 12 peristiwa yang berkaitan dengan hari jadi.

Jika peristiwa tersebut dianalisis berdasarkan landasan kriteria dan dengan mempertimbangkan penilaian aspek historis, filosofis, politik, dan sosiologis, maka peristiwa Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat yang terjadi pada Kemis Pon, 29 Jumadilawal 1680 atau 13 Maret 1755 menempati peringkat pertama da-lam nominasi hari jadi DIY.

Baha Uddin mengatakan, berdasarkan sumber sejarah *Babad Giyanti*, *Babad Mentawai*, *Babad Mangkubumi* dan *Babad Ngayogyakarta* serta sumber turunannya seperti *Serat Rerenggan Kraton* dan *Serat Kunjarharata*, diperoleh informasi bahwa satu bulan setelah Perjanjian Giyanti, 13 Februari 1755, Sultan Hamengku Buwono I berkunjung ke Pesanggrahan Garjatiwati yang ada di hutan Beringan, *lenggah siniwaka* (duduk disinggahsana) di hadapan abdi dalem dan para purna senilana untuk mendelarasikan Hadeging Nagari Ngayogyakarta dan menentukan hutan Beringan

sebagai lokasi yang akan didirikan Kraton Yogyakarta.

Baha Uddin menyebut, peristiwa ini merupakan tonggak sejarah yang penting, unik, dan membanggakan bagi segenap warga Yogyakarta, karena untuk pertama kalinya digunakan nama *Ayodhya* sebagai nama resmi negara, yang kemudian berkembang menjadi *Ngayogyakarta* lalu *Ngayogyakarta Hadiningrat* yang berarti tempat yang baik dan sejahtera yang menjadi suri tauladan keindahan alam semesta.

"Peristiwa ini juga menandai puncak jiwa kemerdekaan yang digelorekan oleh Sultan Hamengku Buwono I untuk melepaskan diri dari hegemoni dan intervensi kolonialisme Belanda untuk membangun sebuah peradaban baru yang bernama Ngayogyakarta Hadiningrat," kata Baha Uddin pula.

Selain itu, lanjutnya, peristiwa ini secara *de jure* sudah memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan untuk menjadi sebuah negara yang berbentuk Kasultanan, yaitu pemimpin, rakyat, wilayah, dan pemerintahan.

Kecuali fakta historis (*historical fact*), secara fakta sosial (*socio fact*) peristiwa yang jatuh pada 29 Jumadil Awal, pada setiap tahunnya selalu diperingati oleh Kraton Yogyakarta dengan melakukan *Saman Alquran*.

"Pelaksanaan peringatan ini sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama, dan kemudian menjadi ciri khas tersendiri bagi identitas dan eksistensi Kraton Yogyakarta," katanya.

Pasca peristiwa ini, Sultan Hamengku Buwono I kemudian memerintahkan untuk membangun kembali Pesanggrahan Ambarketawang untuk dijadikan sebagai tempat kediaman sementara. "Pada bulan Oktober 1755, Pesanggrahan Ambarketawang selesai dibangun kembali dan Sultan Hamengku Buwono I beserta keluarganya kemudian mengungsi di tempat tersebut," jelasnya.

Bersamaan dengan hal itu, pada 9 Oktober 1755 proses pembangunan Kraton Yogyakarta dimulai. Kurang lebih satu tahun kemudian beberapa bangunan utama Kraton Yogyakarta sudah berhasil dibangun. Oleh karenanya Sultan Hamengku Buwono I beserta keluarganya kemudian mengungsi di tempat tersebut, jelasnya.

"Sengkalen memet ini jika diartikan merujuk pada tahun 1682 Jawa atau 1756 M. Peristiwa ini tepatnya terjadi pada Kemis Pahing, 13 Sura 1682 Jawa atau 7 Oktober 1756," jelasnya.

Baha Uddin mengatakan, dampak yang diharapkan dengan adanya penetapan hari jadi adalah tumbuhnya kesadaran harga diri dan penghargaan bagi orang lain, sehingga diharapkan akan menumbuhkan kecintaan semua lapisan masyarakat kepada DIY untuk menjaga dan melestarikan, bahkan dapat menumbuhkan rasa *handarbeni*.

"Identitas wilayah yang mempunyai nilai historis yang tinggi juga dapat membangun semangat dan rasa kagum atas jasa dan pengorbanan *the founding father*," katanya.

Kesadaran akan harga diri tersebut membentuk karakter pribadi masyarakat Yogyakarta yang mempunyai karakter dan etos kerja yang mencerminkan perjuangan para pemimpin Yogyakarta dalam mempertahankan eksistensi daerah.

"Penetapan hari jadi DIY ini juga berorientasi pada pemajuan dan penguatan kebudayaan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Yogyakarta," kata Baha Uddin.



KR-Wawan Irawan
Kraton Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005